



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KPKNL PADANGSIDIMPUAN

DJKN

LAPORAN KINERJA 2022

KPKNL PADANGSIDIMPUAN



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidempuan Tahun Anggaran 2022 disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Selama tahun 2022 KPKNL Padangsidempuan telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategis KPKNL Padangsidempuan Tahun 2022 yang diterjemahkan dalam Kontrak Kinerja Kepala Kantor KPKNL Padangsidempuan Tahun 2022 yang terdiri dari 19 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dari hasil pengukuran kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Padangsidempuan telah mencapai 115,22%. Nilai tersebut berasal dari Capaian Kinerja pada masing-masing perspektif yaitu *Stakeholder Perspective* 30%, *Customer Perspective* 16,58%, *Internal Proess Perspective* 34,85%, dan *Learning and Growth Perspective* 34,39%.

Pencapaian tersebut adalah bentuk pelayanan KPKNL Padangsidempuan kepada *stakeholder* yang selama ini berkontribusi pada penerimaan negara yang berasal dari pengelolaan kekayaan negara atau aset negara, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang. Hal ini dapat dilihat dari hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan dengan indeks 4,81 dari skala 5,00.

Akhir kata, LAKIN Tahun Anggaran 2022 ini disampaikan sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas kepada Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara dan semoga LAKIN ini dapat menjadi referensi dalam pengelolaan kinerja di masa mendatang serta sebagai pendorong dalam meningkatkan kinerja KPKNL Padangsidempuan.

Kepala KPKNL Padangsidempuan

Raden Hariyadi Murti Kurniawan

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
1. Tugas dan Fungsi	1
2. Struktur Organisasi	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis	8
B. Perjanjian Kinerja	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. Capaian Kinerja Organisasi	12
B. Realisasi Anggaran	33
BAB IV PENUTUP	36
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dijelaskan bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPKNL Padangsidimpuan dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparent, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan ini merupakan laporan berkala yang disusun KPKNL Padangsidimpuan sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kepada seluruh *stakeholder* selama tahun 2022. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas dan Fungsi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan adalah salah satu instansi vertikal DJKN yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara. KPKNL

Padangsidimpuan mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021, KPKNL Padangsidimpuan menyelenggarakan fungsi:

- a. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
- b. Registrasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. Pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- h. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- j. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

Tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan KPKNL Padangsidimpuan dalam daerah/wilayah kerja wewenangnya berdasarkan peraturan. Wilayah kerja KPKNL Padangsidimpuan meliputi 14 wilayah Kabupaten/Kota, antara lain:

1. Kota Padangsidimpuan;
2. Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Kabupaten Tapanuli Utara;
4. Kabupaten Tapanuli Selatan;
5. Kabupaten Padang Lawas;
6. Kabupaten Padang Lawas Utara;
7. Kabupaten Mandailing Natal;
8. Kabupaten Humbang Hasundutan;
9. Kabupaten Nias;
10. Kabupaten Nias Selatan;
11. Kabupaten Nias Utara;
12. Kabupaten Nias Barat;

13. Kota Gunungsitoli; dan
14. Kota Sibolga.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021, maka susunan organisasi KPKNL Padangsidimpuan menjadi sebagai berikut:

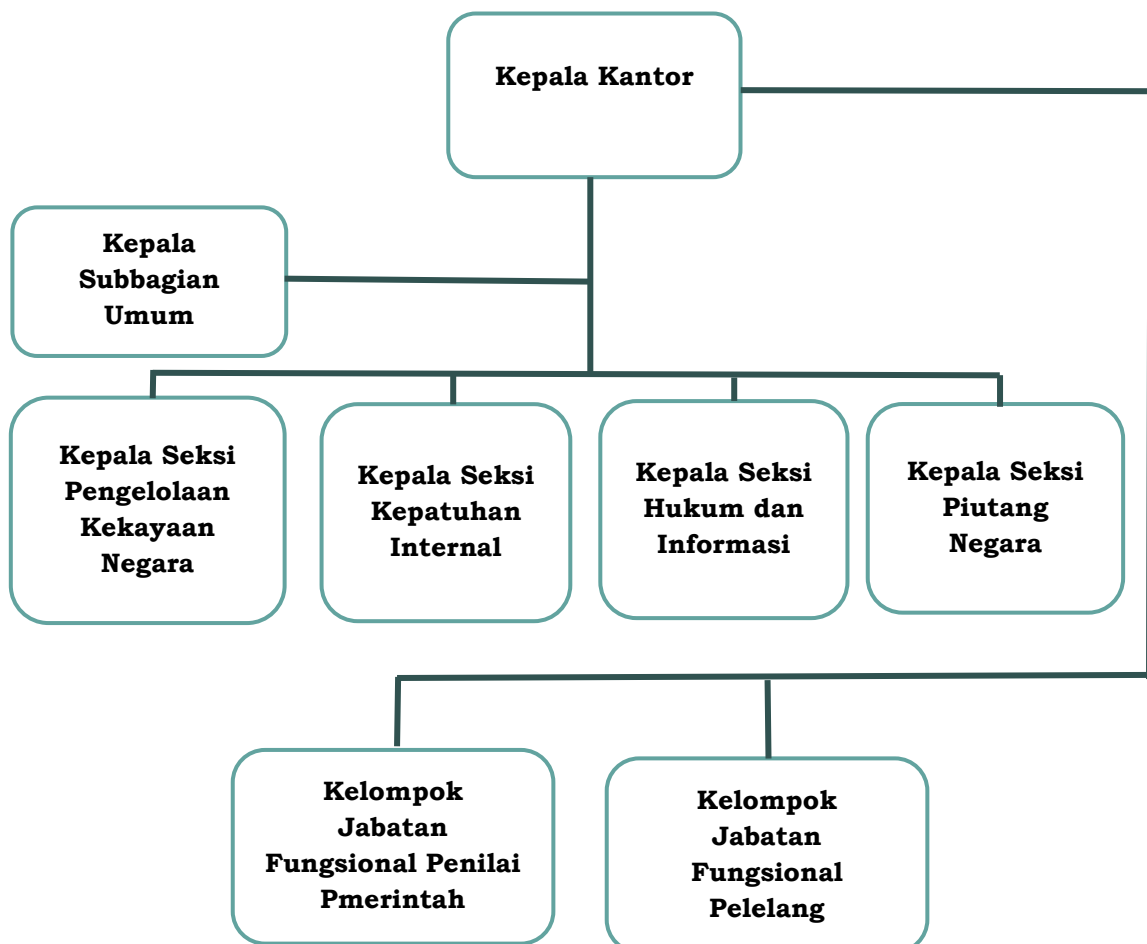
- a. Subbagian Umum, yang mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, serta penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara di lingkungan KPKNL;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetaoan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan daftar barang milik negara/kekayaan negara;
- c. Seksi Piutang Negara, yang mempunyai tugas penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan Piutang Negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis, dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- d. Seksi Hukum dan Informasi, yang mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, insfrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
- e. Seksi Kepatuhan Internal, yang mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis;
- f. Kelompok jabatan fungsional, yang mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang terdiri dari:
 - a) Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan

kegiatan di bidang penilaian properti dan/atau bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) Jabatan Fungsional Pelelang adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan lelang dalam lingkungan instansi pemerintah. Pelelang mempunyai tugas pokok melaksanakan Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan Lelang Noneksekusi Sukarela.

Struktur Organisasi KPKNL Padangsidimpuan dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut:

Gambar 1.2
Struktur Organisasi KPKNL Padangsidimpuan

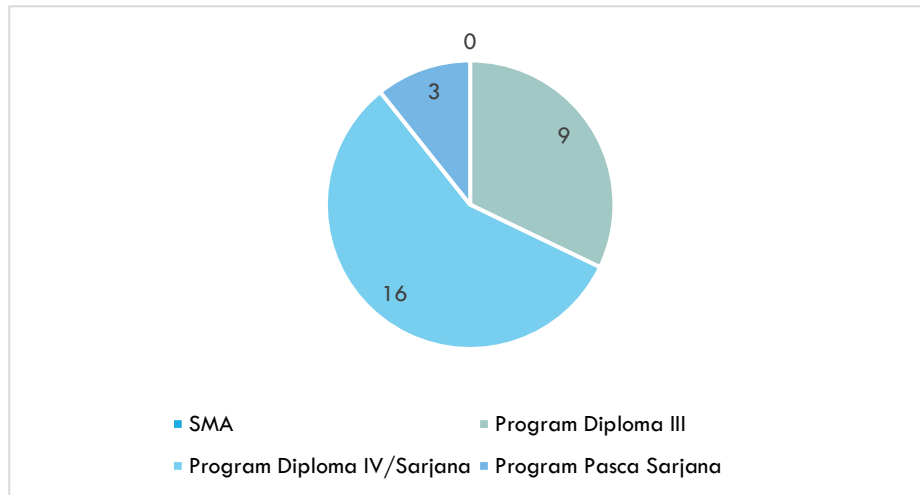


Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPKNL Padangsidimpuan didukung oleh 28 orang pegawai yang terdiri dari 1 Pejabat Administrator (Kepala Kantor), 4

Pejabat Pengawas (Kepala Subbagian/Seksi), 3 Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah, 3 Pejabat Fungsional Pelelang, dan 17 Pelaksana.

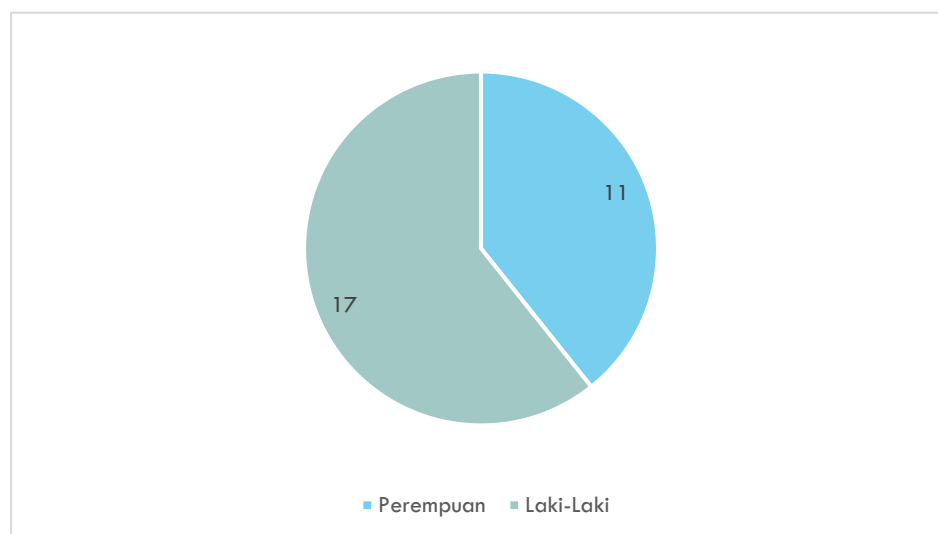
Adapun komposisi pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan dapat dilihat pada Grafik 1.1 sebagai berikut:

Grafik 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan



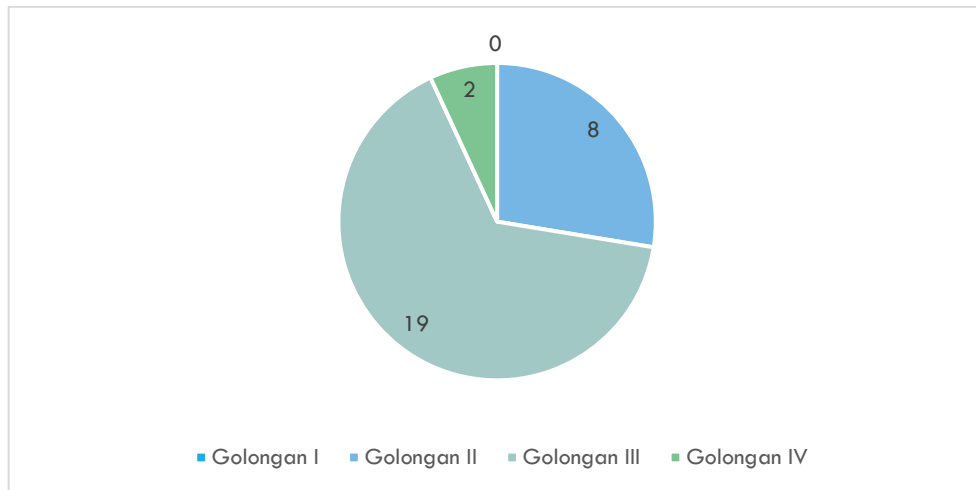
Dilihat dari jenjang pendidikan, pegawai KPKNL Padangsidempuan mayoritas terdiri dari pegawai lulusan Program Diploma III berjumlah 16 pegawai, lulusan Program D-IV/Sarjana berjumlah 9 pegawai, dan lulusan Program Pasca Sarjana berjumlah 3 pegawai.

Grafik 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender



Grafik 1.2 menunjukkan komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin. Terlihat bahwa KPKNL Padangsidempuan terdiri dari 11 pegawai perempuan dan 17 pegawai laki-laki.

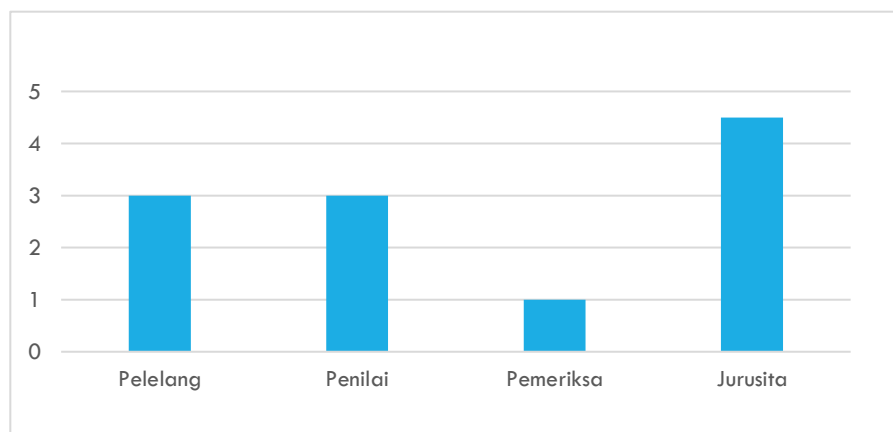
Grafik 1.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan



Grafik 1.3 menunjukkan komposisi pegawai berdasarkan jenis golongan. Terlihat bahwa KPKNL Padangsidempuan terdiri dari 2 pegawai golongan IV, 18 pegawai golongan III, dan 8 pegawai golongan II.

Selanjutnya, pada Grafik 1.4 ditunjukkan sebaran jabatan fungsional pada KPKNL Padangsidempuan. terdapat 3 pegawai memiliki keahlian sebagai Pelelang, 3 pegawai memiliki keahlian Penilai Pemerintah, 1 Juru Sita, dan 1 Pemeriksa.

Grafik 1.4
Tenaga Fungsional KPKNL Padangsidempuan



C. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) KPKNL Padangsidempuan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum mengenai KPKNL Padangsidempuan seperti tugas, fungsi, dan stuktur organisai KPKNL Padangsidempuan.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini menyajikan rencana strategis dan visi misi KPKNL Padangsidempuan, kontrak kinerja serta langkah yang dilakukan organisasi untuk mencapai tujuannya.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini, disajikan data pengukuran capaian indicator kinerja utama yang telah dicapai KPKNL Padangsidempuan, evaluasi dan analisis kinerja dan realisasi anggaran.

4. Bab IV Penutup

Bab ini akan menguraikan tentang pencapaian, permasalahan dan kendala tahun 2022, dan strategi pemecahan masalah untuk tahun 2023.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi untuk mencapai visi dan tujuan yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu.

Sesuai konsep rencana strategis DJKN Tahun 2020-2024, visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yaitu **“Menjadi pengelola kekayaan negara yang professional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan serta untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”**.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka KPKNL Padangsidimpuan telah menetapkan misi yang tertuang di dalam Rencana Strategis KPKNL Padangsidimpuan Tahun 2020-2024 yaitu:

- a. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
- b. Mengamankan tata kelola dan nilai tambah pengelola kekayaan negara;
- c. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelola kekayaan negara;
- d. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
- e. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrument jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Kemudian, untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Padangsidimpuan untuk periode 2020-2024 yaitu:

- a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
- b. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
- c. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
- d. Birokrasi dan layanan public Padangsidimpuan yang *agile*, efektif, dan efisien.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 KPKNL Padangsidimpuan disusun berdasarkan pada sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) sehingga kinerjanya dapat diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dengan Kontrak Kinerja antara Kepala KPKNL Padangsidimpuan dengan Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara pada Tahun 2022.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPKNL Padangsidimpuan harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan Sasaran Strategis (SS) KPKNL Padangsidimpuan.

Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategis organisasi. Peta Strategi KPKNL Padangsidimpuan adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Peta Strategi Kemenkeu *Three* KPKNL Padangsidimpuan TA 2022



Dalam Peta Strategi Kemenkeu *Three* KPKNL Padangsidimpuan Tahun 2022 ditetapkan 11 Sasaran Strategis dan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala KPKNL Padangsidimpuan dengan Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara Tahun 2022. Rincian selengkapnya tentang Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1
Sasaran Strategis dan Target IKU Kemenkeu *Three* KPKNL
Padangsidimpuan TA 2022

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							
1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	20%	25%	25%	30%	30%	36%	36%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	-	-	-	-	-	4,76	4,76
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	50%	50%	55%	55%	65%	65%
4b-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	20%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
6a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6b-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
7	Edukasi yang Efektif							
7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	-	89	89	-	89	89	89
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan pengelolaan kekayaan negara	-	40%	40%	-	40%	85%	85%
9	SDM yang Kompeten							
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
10	Organisasi yang Fit For Purpose							
10a-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	-	-	-	-	-	80	80
10b-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90	90	90	90	90	90	90
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal							
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%
11b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	10%	50%	50%	85%	85%	100%	100%

BAB III

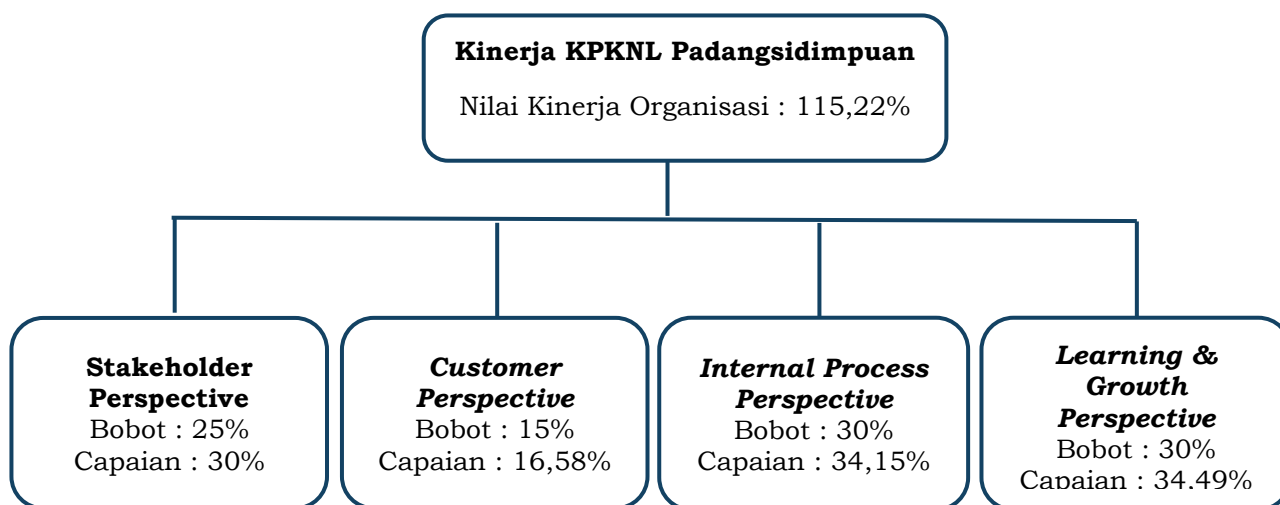
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja KPKNL Padangsidempuan sesuai dengan konsep BSC dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif.

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Padangsidempuan adalah sebesar 115,22 %. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif yang ditunjukkan pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1
Capaian Kinerja Masing-Masing Perspektif



Selama tahun 2022, terdapat 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Kemenkeu *Three* KPKNL Padangsidempuan, dimana 18 IKU telah memenuhi target dengan status capaian HIJAU dan 1 IKU dengan status capaian KUNING yaitu Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran. Berikut rincian capaian kinerja atas 19 IKU KPKNL Padangsidempuan Tahun 2022 :

Tabel 3.1
Sasaran Strategis, Target, Realisasi dan Capaian Kemenkeu Three KPKNL
Padangsidimpuan Tahun 2022

No	Kode IKU	Uraian IKU	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Indeks Max. 120%
1	1a-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	127,42%	100%	165,72%	120%
2	1b-CP	Persentase produktivitas lelang	44,48%	36%	132,59%	120%
3	2a-CP	Persentase penurunan outstanding piutang	142%	100%	1205,09%	120%
4	2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	165,47%	100%	191,89%	120%
5	3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	4,80	4,76	4,81	101,05%
6	4a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK	75,19%	65%	124,73%	120%
7	4b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	126,50%	100%	114,51%	114,51%
8	4c-CP	Persentase efektivitas penyelesaian BKP	100%	100%	126,67%	120%
9	4d-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	123,88%	100%	135,45%	120%
10	5a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	3,79%	19%	2,12%	120%
11	6a-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional	100%	92%	108,70%	108,70%
12	6b-CP	Deviasi data PNPB fungsional DJKN	0%	10%	0%	120%
13	7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	93,33	89	106,30	106,30%
14	8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	91,38%	85%	110,14%	110,14%
15	9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	120%	100%	120%	120%
16	10a-N	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	99,75	80	99,05	120%
17	10b-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD pejabat administrator	99,48	90	99,61	110,67%
18	11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	94,85%	95,5%	99,2%	99,22%

19	11b-CP	Persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	-	100%	203%	120%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)						115,22%

Dari capaian kinerja terhadap 19 IKU Kemenkeu Three KPKNL Padangsidempuan tahun 2022 tersebut, KPKNL Padangsidempuan melakukan analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu *Three* Tahun 2022. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara target awal tahun dan realisasi kinerja Tahun 2022. Selanjutnya, berikut ini kami sajikan analisis dan evaluasi atas pencapaian target setiap IKU dalam Kemenkeu *Three* KPKNL Padangsidempuan Tahun 2022.

1. SASARAN STRATEGIS : Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang.

Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi: (1) perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND; (2) pengurusan piutang negara; (3) pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dapat dikatakan optimal apabila: (1) seluruh BMN, KNL, dan KND telah terutilisasi sesuai potensi terbaiknya; dan (2) pengelolaan BMN, KNL, KND, piutang negara dan lelang mampu mendorong penerimaan negara dan penghematan belanja.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Padangsidempuan mengidentifikasi 2 IKU, sebagaimana berikut:

1) Indikator Kinerja Utama : Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

- a. PNBP Pengelolaan BMN, yaitu penerimaan dari hasil pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan. Besar Penerimaan Negara yang bersumber dari PNBP Aset ditargetkan sebesar Rp3.100.000.000,- atau 100%

dan realisasi apaian didapatkan adalah sebesar Rp5.343.476.278,- atau 172,37% (indeks tanpa batas) dengan status capaian HIJAU. Persentase capaian kinerja dari PNBP Aset ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan pada tahun 2021.

b. PNBP Piutang Negara, yaitu penerimaan dari pengurusan piutang negara. Total realisasi PNBP Piutang Negara yang dapat dicapai tahun 2022 adalah sebesar Rp 5.441.500,- atau 98,94% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 5.500.000,- atau 100%. Dalam merealisasikan IKU ini, seksi Piutang Negara telah melakukan berbagai upaya seperti penagihan secara *on the spot*, komunikasi via telepon serta Kebijakan *Crash Program* / Keringanan Utang melalui PMK 15/PMK.06/2021 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme *Crash Program* Tahun Anggaran 2021.

c. PNBP Lelang, terdiri dari :

- Bea lelang pejabat lelang kelas I;
- Bea lelang pegadaian;
- Denda keterlambatan penyetoran bea lelang oleh PL Kelas II/Balai Lelang;
- Biaya permohonan lelang;
- Penerimaan dari uang jaminan pembeli wanprestasi;
- Penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Total realisasi PNBP Lelang yang dapat dicapai tahun 2022 adalah sebesar Rp 2.034.593.119,- atau 150,71% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.350.000.000,- atau 100%.

Persentase capaian kinerja dari PNBP Lelang ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2021 dikarenakan Kelompok Jabatan Fungsional Pelelang rutin melaksanakan penggalan potensi lelang ke pemerintahan daerah maupun perbankan, sosialisasi mengenai lelang.go.id, serta penggalan potensi lelang UMKM sehingga daya beli dan minat masyarakat terhadap barang lelang menjadi meningkat.

Tabel 3.2
Capaian Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan
Negara dan Lelang

Kode Iku	Uraian IKU	Uraian	Target 2022	Realisasi 2022	Indeks Max. 120%
1a-CP	Persentase penerimaan Negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	PNBP Pengelolaan BMN	Rp 3.100.000.000,-	Rp 5.343.476.728,-	120%
		PNBP PN	Rp 5.500.000,-	Rp 5.441.498,-	
		PNBP Lelang	Rp 1.350.000.000,-	Rp 2.034.593.117	

2) Indikator Kinerja Utama : Persentase Produktivitas Lelang

Produktivitas lelang dinilai dari seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai satu frekuensi lelang laku.

Persentase produktivitas lelang ditetapkan targetnya sebesar 36% dan mencapai realisasi sebesar 47,73% atau persentasenya mencapai 120% dengan status capaian HIJAU. Pencapaian ini apabila dibandingkan dengan pencapaian pada tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 3,23%.

Tabel 3.3
Capaian Persentase Produktivitas Lelang

Kode Iku	Uraian IKU		Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022 (Indeks Tanpa Batas)		Indeks Max. 120%
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	Frekuensi Lelang	46,13%	36,00%	419	47,73%	120%
		Lelang Laku			200		

2. SASARAN STRATEGIS : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Padangsidimpuan mengidentifikasi 2 IKU, sebagaimana berikut:

1) Indikator Kinerja Utama : Persentase Penurunan Outstanding Piutang

Indikator Kinerja Utama ini menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari:

- a. penagihan piutang negara, berupa angsuran atau pelunasan piutang
- b. optimalisasi pengurusan piutang negara, misalnya 1) penerbitan Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT), 2) pengembalian Berkas Kepengurusan Piutang Negara (BKPN), 3) pengurusan piutang negara telah selesai (SPPNS).

Tabel 3.4

Capaian Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

Kode Iku	Uraian IKU	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Indeks Max. 120%
2a-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	Rp 103.303.180,06,-	Rp50.000.000,-	Rp602.543.818,07,-	120%

Realisasi tingkat penurunan outstanding piutang negara telah mencapai target. Capaian ini banyak dibantu dari jumlah PSBDT yang meningkat dikarenakan banyaknya alamat debitur yang tidak dapat dilacak lagi.

2) Indikator Kinerja Utama : Persentase realisasi Pokok Lelang

Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga seara eksklusif atau harga lelang dikurang bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Tabel 3.5**Capaian Persentase Realisasi Pokok Lelang**

Kode Iku	Uraian IKU		Target 2022	Realisasi 2022	Indeks Max. 120%
2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	Pokok Kelas I	Rp 17.000.000.000,-	Rp 31.638.673.249,-	120%
		Pokok Pegadaian	Rp 25.000.000.000,-	Rp 48.956.531.300,-	

3. SASARAN STRATEGIS : Kepuasan Pengguna Layanan Yang Tinggi**Indikator Kinerja Utama : Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL**

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) KPKNL Padangsidimpuan pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 4,76 (skala 5) dengan realisasi sebesar 4,81 dan persentase capaian sebesar 101,05% dengan status capaian HIJAU. Realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL ini sudah mengalami kenaikan selama 3 tahun berturut turut dan pada tahun 2022 ini mengalami kenaikan sebesar 0,01 poin jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021.

IKPL diperoleh dengan cara melakukan survei kepuasan kepada satuan kerja/perorangan yang memperoleh layanan dari KPKNL Padangsidimpuan pada tahun 2022, baik berupa layanan pengelolaan kekayaan Negara, layanan penilaian, layanan lelang, maupun pengurusan piutang Negara.

Secara total terdapat 94 responden yang telah memberikan penilaian atas layanan KPKNL tahun 2022. Nilai realisasi 4,81 merupakan rata-rata dari nilai IKPL untuk setiap layanan. Layanan pengelolaan kekayaan Negara memperoleh IKPL sebesar 4,80, layanan penilaian memperoleh IKPL sebesar 4,88, layanan lelang memperoleh IKPL sebesar 4,79, dan pengurusan piutang Negara memperoleh IKPL sebesar 4,79.

Tabel 3.6

Capaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL

Kode IKU	Uraian IKU	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Indeks Max. 120%
3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	4.80	4.76	4.81	101.05%

Peningkatan nilai IKPL tidak terlepas dari upaya peningkatan kualitas layanan yang diberikan. KPKNL Padangsidimpuan berupaya meningkatkan pelayanan pada pengguna layanan antara lain melalui penyempurnaan Area Pelayanan Terpadu serta penyediaan akses informasi berupa persyaratan layanan dan SOP proses bisnis yang mudah dan dapat dijangkau kapan pun oleh setiap pengguna layanan (<https://linktr.ee/kioskpknl>). Link ini menyediakan opsi layanan konsultasi virtual melalui pesan *Whatsapp* dan *Zoom Meeting* untuk memudahkan pengguna layanan yang tidak dapat datang secara langsung ke KPKNL.

4. SASARAN STRATEGIS : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

Pengelolaan merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Dalam kaitannya dengan kekayaan negara, kegiatan tata kelola meliputi seluruh silus pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara lain-lain, kekayaan negara dipisahkan, penilaian, piutang negara, dan lelang. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian.

Pengelolaan yang akuntabel adalah pengelolaan yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (*good governance*) serta tunduk pada peraturan yang berlaku, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Padangsidimpuan mengidentifikasi 4 IKU, sebagaimana berikut:

1) Indikator Kinerja Utama : Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

Capaian diperoleh dari membandingkan total BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan/Gedung Kantor dan Rumah Negara/Mess pada Satker target di wilayah kerja KPKNL yang telah selesai pengukuran Standar Barang dan Standar Kebutuhannya, dengan total BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan/Gedung Kantor dan Rumah Negara/Mess pada Satker target di wilayah KPKNL Padangsidimpuan. Hasil pengukuran SBSK dituangkan dalam kertas kerja perhitungan atas setiap BMN yang diukur SBSK-nya.

Tabel 3.7

Capaian Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

Kode IKU	Uraian IKU	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Indeks Max. 120%
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	126	65%	81,08%	120%

Persentase pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 65% dengan realisasi sebesar 81,08% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 120% (indeks tanpa batas) dengan status capaian HIJAU. Terdapat kenaikan realisasi capaian antara realisasi capaian tahun 2022 dengan tahun 2021 sebesar 5,89% dikarenakan ada beberapa objek SBSK yang dilakukan optimalisasi dengan melakukan update pengukuran sehingga persentase kesesuaiannya meningkat. Secara keseluruhan tidak ada kendala yg signifikan terhadap IKU tersebut, namun ada beberapa permasalahan untuk tahun ke depannya dimana pengukuran di tahun 2022 akan dilakukan optimalisasi tahun 2023 dan di K/L Kementerian Agama terdapat banyak objek berupa Gedung KUA yang persentase tingkat kesesuaiannya sangat rendah dari target, sehingga diperlukan koordinasi dengan Kanwil DJKN Sumatera Utara agar permasalahan dan data perhitungan capaian tersebut dapat diatasi ditahun depan dan perhitungannya sesuai.

2) Indikator Kinerja Utama : Persentase Bidang Tanah yang Disertifikatkan

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN Tahun 2022 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Penseripikatan BMN berupa Tanah, dengan tugas/kewajiban masing-masing pihak sebagai berikut:

a. Kendali BPN:

1. Melaksanakan penseripikatan BMN;
2. Rekapitulasi data BMN berupa tanah yang telah disertifikatkan

b. Kendali K/L

1. Inventarisasi dan identifikasi BMN belum bersertifikat beserta permasalahannya
2. Melengkapi persyaratan penseripikatan BMN;
3. Menunjukkan letak dan tanda batas tanah;
4. Menyampaikan rekapitulasi data yang akan disertifikatkan;
5. Mengajukan permohonan sertifikasi;
6. Menyusun dan mengajukan anggaran sertifikasi;
7. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMN, paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya sertipikat.

c. Kendali Kemenkeu:

1. Menyimpan asli sertipikat;
2. Updating data BMN yang akan disertifikatkan;
3. Permintaan data BMN bersertifikat kepada BPN;
4. Pengalokasian anggaran sertifikasi
5. Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan:
6. Permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat
7. Identifikasi BMN berupa tanah yang belum memiliki sertifikat. Identifikasi dilakukan dengan memetakan tanah belum bersertifikat pada K/L berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik
8. Penyusunan data BMN belum bersertifikat yang diperkirakan dapat disertifikatkan
9. K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan
10. Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus clean and clear (dokumen persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memiliki

permasalahan) kepada BPN untuk disertifikatkan Pelaksanaan sertifikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan.

Tabel 3.7

Capaian Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan

Kode IKU	Uraian IKU	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Indeks Max. 120%
4b-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang disertifikatkan	506 Bidang Tanah 120%	599 Nominatif dan 111 BBSK 100%	702 Nominatif dan 111 BBSK 114.5%	114,5%

Sesuai dengan amanat pada ketentuan tersebut, pelaksanaan program percepatan pensertipikatan BMN berupa Tanah tahun 2022 terdiri atas target nominatif (penerbitan sertipikat baru) dan target BBSK (proses pergantian nama sesuai ketentuan) dengan jumlah bidang tanah BMN yang ditargetkan pada masing-masing sebanyak 599 dan 111. Adapun persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan ditargetkan sebanyak 100% dengan realisasi sebesar 114,5% atau sebanyak 813 NUP sehingga persentase capaian kinerja sebesar 114,5% (indeks tanpa batas) dengan status capaian HIJAU. Meskipun pada pelaksanaannya terdapat bidang tanah yang tidak dapat dilakukan pensertipikatan sehingga perlu dilakukan perubahan target, namun KPKNL Padangsidimpuan berhasil mensertipikatkan bidang tanah melampaui dari target yang ditetapkan. Keberhasilan tersebut didapatkan karena koordinasi dan kerjasama yang baik antara KPKNL Padangsidimpuan, satuan kerja pemohon serta Kantor Pertanahan terkait. Semua pihak yang terlibat juga telah berkomitmen untuk melakukan upaya terbaik sehingga pada bulan Desember terdapat penambahan bidang tanah bersertipikat belum sesuai ketentuan yang ditambahkan untuk dilakukan proses penggantian nama IKU ini mengalami penurunan persentase sebesar 5,5% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021.

3) Indikator Kinerja Utama : Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN

IKU persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN.

Tabel 3.8

Capaian Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN

Kode Iku	Uraian IKU	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Indeks Max. 120%
4c-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	25 berkas (pembobotan per berkas = 1) 100%	15 berkas 100%	19 berkas 126,67%	120%

Persentase efektivitas penyelesaian BKPN pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 15 berkas (dengan bobot bernilai 1 untuk BKPN yang dinyatakan selesai), yang dapat dicapai dengan penerbitan Produk Hukum Piutang Negara yang menyatakan pengurusan BKPN dinyatakan selesai, diantaranya penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Dinyatakan Lunas (SPPNL); PSBDT ataupun SKPPN. Adapun realisasi yang dicapai sebesar 19 berkas sehingga persentase capaian kinerja sebesar 120% dengan status capaian HIJAU.

4) Indikator Kinerja Utama : Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset)

Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset) mencapai realisasi sebesar 135,45% dari 100% yang ditargetkan sehingga persentase capaian kinerja sebesar 120% dengan status capaian HIJAU. Peningkatan persentase capaian terjadi sejalan dengan peningkatan jumlah realisasi pengukuran dalam implementasi evaluasi kinerja BMN.

Tabel 3.9
Capaian Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Kode IKU	Uraian IKU	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Indeks Max. 120%
4d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	123.88% (83)	100% (50)	135.45% (79)	120%

5. SASARAN STRATEGIS : Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Indikator Kinerja Utama : Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN).

Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/ pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%.

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama

Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

Tabel 3.10
Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

Kode IKU	Uraian IKU	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022 (Indeks Tanpa Batas)	Indeks Max. 120%
5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	3,79%	19%	2,12% (188,84%)	120%

Realisasi IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian adalah sebesar 2,12% dari target sebesar 19% (*minimized*) dengan persentase sebesar 120% dengan status apaian kinerja HIJAU. Kelompok Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah KPKNL Padangsidimpuan bertekat untuk melakukan peningkatan koordinasi dengan Pengelola Barang, dalam hal ini Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara.

6. SASARAN STRATEGIS : Penerapan Tatakelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Padangsidimpuan mengidentifikasi 2 IKU, sebagaimana berikut:

1) Indikator Kinerja Utama : Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional

E-auction adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. E-auction ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ALE (aplikasi lelang melalui email) dan ALI (aplikasi lelang melalui internet sehingga lebih real time dan terbuka).

Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan e-auction dapat menjaring peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang.

Tabel 3.11
Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional

Kode Iku	Uraian IKU	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Indeks Max. 120%
6a-CP		100%	92%	100%	108,70%

	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction				
--	--	--	--	--	--

Persentase pelaksanaan lelang E-auction dan E-conventional auction tahun 2022 ditargetkan sebesar 92% dan mencapai realisasi 100% atau sebesar 108,70% (indeks tanpa batas) dengan status capaian HIJAU. Realisasi capaian ini tidak mengalami perubahan dari tahun 2021 yaitu sama-sama mencapai realisasi 100% dari target yang ditetapkan.

2) Indikator Kinerja Utama : Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari Biaya Administasi (Biad) Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan 425782, 425784 (Pejabat Lelang Kelas I dan Pegadaian).

Target Deviasi PNBP dari PNBP Lelang dan PNBP dari BIAD PPN maksimal 10% dan capaian deviasi pada tahun 2022 adalah sebesar 0,00% yang artinya tidak ada selisih antara aplikasi OMSPAN dengan Dropbox dan Focus PN pada tahun 2022. Berikut rincian apaian dari deviasi data PNBP Fungsional DJKN:

- a. Pembukuan Biad PPN pada aplikasi OMSPAN/KPPN = Rp 5.882.560,-
- b. Pembukuan Biad PPN pada aplikasi Focus PN = Rp 5.882.560,-

Tabel 3.12

Capaian Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

Kode Iku	Uraian IKU	Target 2022	Realisasi 2022 (Indeks Tanpa Batas)	Indeks Max. 120%
6b-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	10%	0% (200%)	120%

7. SASARAN STRATEGIS : Edukasi yang Efektif

Indikator Kinerja Utama : Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

Edukasi merupakan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, pemberian masukan, konsultasi, atau arahan yang dilaksanakan dalam lingkup internal

maupun eksternal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman atas proses bisnis yang harus dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal sehingga output yang ditetapkan dalam suatu pekerjaan dapat tercapai.

Ruang lingkup edukasi adalah (1) edukasi internal dari atasan/unit superintenden kepada bawahan/unit yang diawasi, dan (2) Edukasi eksternal dari kantor wilayah/KPKNL kepada pengguna layanan/masyarakat umum.

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi digunakan untuk mengukur persepsi peserta atas: 1) tingkat pemahaman, 2) kualitas materi, 3) kualitas fasilitator, dan 4) kualitas pendukung pelatihan/sosialisasi yang dilaksanakan. Proses edukasi dan komunikasi dilakukan dengan media seperti pelatihan, sosialisasi, atau workshop. IKU ini mengukur edukasi yang dilakukan oleh kanwil kepada pihak eksternal, seperti satuan kerja (K/L), pemohon lelang, pembeli lelang, masyarakat, dan lainnya. Kegiatan edukasi ini dilakukan paling tidak sebanyak dua kali dalam setahun (setiap semester satu kali).

Tabel 3.13

Capaian Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

Kode IKU	Uraian IKU	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Indeks Max. 120%
7a-N	Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	93,22%	89%	94,61%	106,30%

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi pada tahun 2022 ditetapkan sebesar 89. Realisasi mencapai 94,61 atau sebesar 106,30% dengan status capaian HIJAU. Realisasi tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi pada tahun 2-21 mengalami peningkatan sebesar 1,39% dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021. Peningkatan ini didukung oleh peningkatan kualitas edukasi meliputi materi, metode, dan narasumber sehingga sasaran dan tujuan edukasi dan komunikasi dapat tercapai.

8. SASARAN STRATEGIS : Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif Indikator Kinerja Utama : Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada K/L terutama terkait aspek utilitasnya. IKU ini difokuskan pada pemantauan utilitas berupa pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh DJKN selaku pengelola barang.

Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan asset pada KPKNL Padangsidimpuan tahun 2022 mencapai 93,62% dari target yang ditetapkan 85% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 110,14% dengan status capaian HIJAU. IKU ini jika dibandingkan pencapaiannya dengan tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 2,63%.

Tabel 3.14
Capaian Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara

Kode IKU	Uraian IKU		Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022		Indeks Max. 120%
8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan asset	Persetujuan/ Penetapan Sm II 2021 yang ditindaklanjuti K/L	91.38%	85%	21	93.62%	110,14%
		Persetujuan/Penetapan Sm II yang diterbitkan			23		

9. SASARAN STRATEGIS : SDM yang Kompeten

Indikator Kinerja Utama : Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat, kompetensi teknis yang mumpuni, serta tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi.

Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan. Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai

dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DKI.

IKU ini mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangan-nya. Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 24 JP, serta minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan.

Tabel 3.15

Capaian Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Kode IKU	Uraian IKU		Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Indeks Max. 120%
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	Jumlah Pegawai memenuhi kriteria 24 JP	120%	100%	120%	120%
		Jumlah Pegawai melebihi kriteria 24 JP				

Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai pada KPKNL Padangsidimpuan pada tahun 2022 mencapai 120% dari target sebesar 100% atau status capaian kinerja HIJAU. Efek Pandemi Covid-19 masih dirasakan pada tahun 2022 mengakibatkan kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai dilakukan dalam bentuk Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) dan E-learning sebagai metode pembelajaran mandiri bagi pegawai.

Metode pembelajaran dalam bentuk PJJ adalah adalah jenis pelatihan yang baru yang belum pernah dilaksanakan sebelumnya tetapi pada tahun 2022 masih banyak pegawai yang berminat untuk mengikuti PJJ haini karena selain dapat menambah ilmu pengetahuan sebagai penunjang pekerjaan juga dapat menyelesaikan pekerjaan didalam kantor dengan lancar dan tepat waktu.

10. SASARAN STRATEGIS : Organisasi yang fit for purpose

Organisasi yang fit-for-purpose adalah organisasi yang memiliki desain struktur dan mekanisme kerja (value chain) yang selaras dengan tujuan organisasi. Dalam capaian sasaran strategis ini, KPKNL Padangsidempuan mengidentifikasi 2 IKU, yaitu:

1) Indikator Kinerja Utama : Nilai Hasil Review Pengelolaan Kinerja

Realisasi nilai Hasil Reviu Pengelolaan Kinerja pada KPKNL Padangsidempuan pada tahun 2022 mencapai 99,05 dari target yang ditetapkan sebesar 80,00 (skala 100). Reviu pengelolaan kinerja diselenggarakan untuk memberikan *quality assurance* atas pelaksanaan sistem manajemen kinerja yang berjalan. Review pengelolaan kinerja dilakukan atas empat aspek penilaian, yaitu perencanaan kinerja, pelaksanaan/eksekusi kinerja, monitoring dan evaluasi, serta edukasi pengelolaan kinerja.

Terdapat sedikit perbedaan dalam komponen penilaian dan mekanisme penilaian review pada tahun 2022 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Mulai tahun 2022, diberlakukan konsep *self assessment* penilaian kinerja, dimana setiap Submanajer Kinerja Organisasi melakukan review mandiri atas kelengkapan dokumen pengelolaan kinerja sebelum kemudian direview oleh manajer kinerja tingkat atasnya (dhi. Kanwil DJKN Sumatera Utara). Selain itu, terdapat penambahan beberapa komponen detail khususnya untuk aspek edukasi pengelolaan kinerja.

Nilai review pengelolaan kinerja utamanya didukung oleh perbaikan terus menerus dalam pengelolaan kinerja dengan pelaksanaan refinement IKU dan resource forum anggaran yang lebih tertata, peningkatan keterlibatan seluruh pegawai dalam penyusunan IKU dan manual IKU, serta didukung juga dengan penggunaan *e-performance* dalam manajemen kinerja.

Tabel 3.16

Capaian Nilai Hasil Review Pengelolaan Kinerja

Kode IKU	Uraian IKU	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Indeks Max. 120%
10a-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	99.75%	80%	99.05%	120%

2) Indikator Kinerja Utama : Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator

Realisasi Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator pada KPKNL Padangsidempuan tahun 2022 mencapai 99,61 dari target yang ditetapkan sebesar 90 (skala 100) sehingga persentase capaian kinerja adalah sebesar 110,67% dengan status capaian HIJAU.

Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator diperoleh dari kombinasi nilai antara penilaian hasil *feedback* pegawai (peserta FGD) dan nilai kecepatan penyelenggaraan FGD. Sepanjang tahun 2022 telah dilaksanakan empat kali FGD Pejabat Administrator yaitu pada triwulan I dengan tema “Kemenkeu Dinamis, Berintegritas, dan Kolaboratif”; triwulan II dengan tema “Kemenkeu Menuju Normal Baru”; triwulan III dengan tema “Cintai Negeri, Kelola Keuangan Pribadi”; dan triwulan IV dengan tema “Penguatan Budaya Kemenkeu Mendukung Layanan Digital dan Penerimaan Optimal”.

Tabel 3.17

Capaian Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator

Kode IKU	Uraian IKU	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Indeks Max. 120%
10b-N	Indeks efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	99.48%	90%	99.61%	110.67%

11. SASARAN STRATEGIS : Pengelolaan Keuangan yang Optimal

Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK.

Unsur yang diukur terdiri dari 2 komponen penilaian yaitu komponen hasil dan komponen proses. Komponen hasil dinilai dari 4 indikator yaitu capaian keluaran, efisiensi, konsistensi, dan penyerapan anggaran atas pagu netto, sedangkan komponen proses dinilai dari 10 indikator yaitu penyelesaian tagihan, data kontrak, pengelolaan UP, perencanaan kas, rekon LPJ Bendahara, pengembalian SPM, retur SP2D, retur DIPA, pagu minus, dan dispensasi SPM.

1) **Indikator Kinerja Utama : Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran**

Persentase kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 95,5% dengan realisasi Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai 99,36% dan nilai SMART DJA 91,68% dimana untuk pembobotan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA) terdiri dari komposisi 40% nilai IKPA dan 60% nilai SMART sehingga secara akumulasi untuk Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA) tercapai 94,75% atau secara persentase mencapai 99,22% dari target dengan status capaian KUNING.

Tabel 3.17

Capaian Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Kode IKU	Uraian IKU	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Indeks Max. 120%
11a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	94,85%	95,5%	94,75%	99,22%

2) **Indikator Kinerja Utama : Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan**

Pada persentase kualitas pengadaan mencapai 226,87%, realisasi ini dihitung dari pemanfaatan aplikasi SIRUP-E, E-Tendering/Seleksi, Non e-Tendering & Non e-Purchasing serta E-Kontrak yang disesuaikan dengan paket belanja yang diumumkan pada aplikasi RUP dimana realisasi persentase kualitas pengadaan tercapai 226,87% atau secara persentase mencapai 120% dari target dengan status capaian HIJAU.

Tabel 3.17

Capaian Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Kode IKU	Uraian IKU	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022 (Indeks Tanpa Batas)	Indeks Max. 120%
11b-CP	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	-	100%	226,87%	120%

B. REALISASI ANGGARAN

Sebagaimana diuraikan dalam Peta Strategis KPKNL Padangsidempuan yang terdiri dari 11 sasaran strategis dengan 19 indikator kinerja utama, dimana salah satunya adalah sasaran strategis terkait Pengelolaan Keuangan yang Optimal dengan indikator kinerja utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.

Adapun nilai jumlah anggaran KPKNL Padangsidempuan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 1.919.584.000,00,- (satu milyar sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan persentase realisasi anggaran TA 2022 sebesar 93,04% atau sejumlah Rp 1.785.960.162,00,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu seratus enam puluh dua rupiah). Berikut terlampir rincian realisasi penyerapan anggaran pada tahun anggaran 2022:

Tabel 3.18

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun Anggaran 2022 pada KPKNL Padangsidempuan

Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
4796. BMB. 001	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	Rp2.049.000	Rp1.850.000	90,29	Rp199.000
4796. BMB. 002	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang	Rp5.635.000	Rp2.739.900	48,62	Rp2.895.200
4798. AAH.0 01	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	Rp41.800.000	Rp34.537.999	82,63	Rp7.262.001
4798. AAH.0 02	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	Rp7.490.000	Rp7.017.000	93,68	Rp473.000
4798. AAH.0	Risalah Lelang	Rp33.820.000	Rp31.028.392	91,75	Rp2.791.608

03					
4798. AAH.0 05	Risalah Lelang Sukarela UMKM (PU)	Rp11.024.000	Rp8.042.000	72,95	Rp2.982.000
4798. FAE.0 01	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PU)	Rp29.176.000	Rp27.203.997	93,24	Rp1.972.003
4798. FAE.0 03	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	Rp14.428.000	Rp12.428.500	86,14	Rp1.999.500
4798. FAE.0 04	Rekomendasi Hasil Kajian Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	Rp43.164.000	Rp39.904.100	92,45	Rp3.259.900
4798. FAE.0 06	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	Rp9.420.000	Rp8.417.000	89,35	Rp1.003.000
4798. FAE.0 07	Rekomendasi Hasil Penilaian	Rp10.580.000	Rp6.775.000	64,04	Rp3.805.000
4798. FAE.0 09	Penggalian Potensi Lelang	Rp3.140.000	Rp1.106.000	35,22	Rp2.034.000
4700. EBA.9 69	Layanan Bantuan Hukum	Rp13.358.000	Rp11.739.425	86,52	Rp1.828.575
4701. EBA.0 02	Kerumahtanggaan	Rp74.308.000	Rp62.063.140	83,52	Rp12.244.860
4701. EBA.9	Layanan Perkantoran	Rp1.320.492.000	Rp1.235.964.858	93,60	Rp84.527.142

94					
4701. EBB.0 01	Peralatan Fasilitas Perkantoran	Rp15.550.000	Rp15.478.950	99,54	Rp71.050
4701. EBB.0 03	Kendaraan Bermotor	Rp269.450.000	Rp269.400.001	99,98	Rp49.999
4702. BMB. 002	Kehumasan	Rp5.070.000	Rp2.214.000	43,67	Rp2.856.000
4704. EBA.0 01	Rekomendasi Kepatuhan Internal	Rp9.420.000	Rp8.050.000	85,46	Rp1.370.000
Total		Rp1.919.584.000	Rp1.785.960.162	93,04	Rp133.623.838

BAB IV

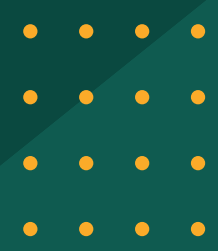
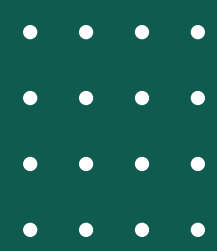
PENUTUP

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, KPKNL Padangsidimpuan sebagai salah satu unsur Kementerian Keuangan telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecards (BSC)* sehingga kinerja KPKNL Padangsidimpuan diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan penapaian sasaran-sasaran strategis pada tahun 2022.

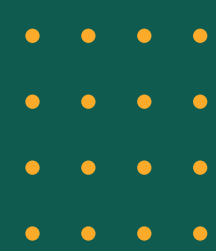
Laporan Kinerja (LAKIN) KPKNL Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2022 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi DJKN dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis DJKN pada Tahun Anggaran 2022 yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-*Three* KPKNL Padangsidimpuan Tahun 2022 yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) DJKN Tahun 2020-2024.

Adanya berbagai hambatan dan permasalahan merupakan pembelajaran yang berharga untuk perbaikan kinerja tahun yang akan datang. Berbagai hambatan baik internal maupun eksternal diharapkan dapat diatasi untuk meningkatkan kapabilitas dan kualitas pelayanan kepada pelayanan masyarakat secara optimal.

Akhirnya, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPKNL Padangsidimpuan. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja KPKNL Padangsidimpuan, serta dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan ke depan.



LAMPIRAN





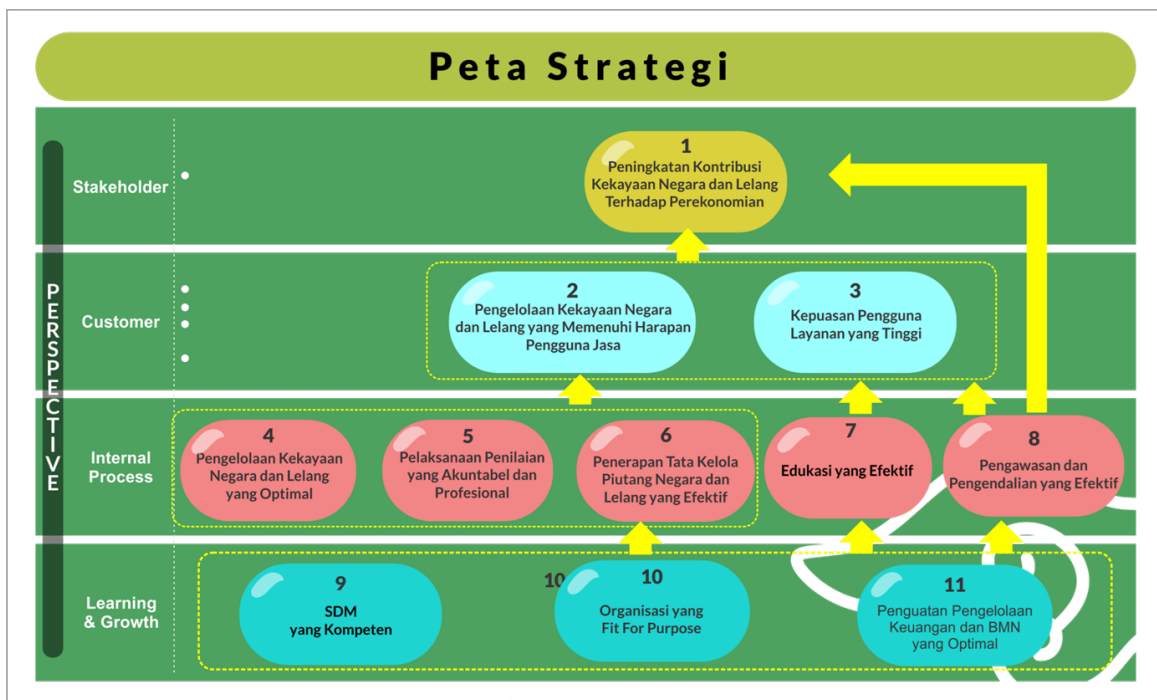
**KONTRAK KINERJA
NOMOR: 10/KN.14/2022
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG PADANGSIDIMPUAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022**

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Padangsidimpuan, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



9



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PADANGSIDIMPUAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		1b-CP Persentase Produktivitas Lelang	36%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,76
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	4a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%
		4b-CP Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100%
		4c-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
		4d-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	6a-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%
		6b-CP Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%
7	Edukasi yang Efektif	7a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	89
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	8a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan pengelolaan kekayaan negara	85%
9	SDM yang Kompeten	9a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
10	Organisasi yang Fit For Purpose	10a-N Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	80
		10b-N Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	11a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%
		11b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%

Kegiatan	Anggaran
Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp 207.826.000
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp 7.684.000
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp -
3. Pengelolaan Aset	Rp 200.142.000
4. Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	Rp -
5. Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	Rp -
6. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	Rp -
Dukungan Manajemen	Rp 1.707.858.000
1. Legislasi dan Litigasi	Rp 13.568.000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 1.679.800.000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp 5.070.000
4. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp -
5. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp -
6. Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	Rp -

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan
Negara Sumatera Utara



Ditandatangani Secara Elektronik
Tedy Syandriadi

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Padangsidempuan



Ditandatangani Secara Elektronik
Raden Hariyadi Murti Kurniawan



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PADANGSIDIMPUAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							
1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	20%	25%	25%	30%	30%	36%	36%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	-	-	-	-	-	4,76	4,76
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	50%	50%	55%	55%	65%	65%
4b-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	20%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
6a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6b-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
7	Edukasi yang Efektif							
7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	-	89	89	-	89	89	89
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan pengelolaan kekayaan negara	-	40%	40%	-	40%	85%	85%
9	SDM yang Kompeten							
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
10	Organisasi yang Fit For Purpose							
10a-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	-	-	-	-	-	80	80
10b-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90	90	90	90	90	90	90
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal							
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%
11b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	10%	50%	50%	85%	85%	100%	100%

Pejabat/Pegawai/PNS yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Raden Hariyadi Murti Kurniawan



**INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDIMPUAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Anggaran
				Kegiatan	Output			
1	SS: Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian IKU: Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN	Jumlah aset yang diberdayakan dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat	Q1: Inventarisasi terhadap aset yang akan diberdayakan/ dimanfaatkan Q2: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan Q3: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan Q4: Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Q1: Daftar Aset yang akan diberdayakan/ dimanfaatkan Q2: Laporan Kegiatan Monitoring Q3: Laporan Kegiatan Monitoring Q4: Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan	Q1 s.d Q4	Seksi PKN	

Pejabat/Pegawai/PNS yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Raden Hariyadi Murti Kurniawan



Sasaran Kerja Pegawai

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN
1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Raden Hariyadi Murti Kurniawan	NAMA	Tedy Syandriadi
NIP	197510071996021001	NIP	196508291991031001
PANGKAT/GOL RUANG	Pembina, IV/a	PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Padangsidempuan	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara

NO	RENCANA KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
A. KINERJA UTAMA			
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
2	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	Persentase Produktivitas Lelang	36%
3	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa Dukungan pembaca layar diaktifkan.	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa Dukungan pembaca layar diaktifkan.	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
5	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,76
6	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%
7	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100%
8	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
9	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
10	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%
11	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%
12	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%



	Lelang yang Efektif		
13	Edukasi yang Efektif	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	89
14	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan pengelolaan kekayaan negara	85%
15	SDM yang Kompeten	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
16	Organisasi yang Fit For Purpose	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	80
17	Organisasi yang Fit For Purpose	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90
18	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%
19	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal Dukungan pembaca layar diaktifkan.	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%

B. KINERJA TAMBAHAN

Padangsidempuan, 31 Januari 2022

Pegawai yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Raden Hariyadi Murti Kurniawan
NIP 197510071996021001

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Tedy Syandriadi
NIP 196508291991031001



LAPORAN CAPAIAN KINERJA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDIMPUAN
KANWIL DJKN SUMATERA UTARA
TAHUN 2022

s.d. 31 Des 2022

SS	IKU	V/C	Uraian IKU	Target Tahun 2022	Realisasi						
					Q1	Q2	Semester 1	Q3	s.d. Q3	Q4	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4			Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal								
	4a-CP	P/L	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%	0,877975						
			a. Tingkat Kesesuaian Pengukuran	Bobot 75%	83,73%	77,95%	77,95%	77,40%	77,40%	79,95%	79,95%
			b. Monev Kesesuaian - Optimalisasi	Bobot 25%	100,00%	99,03%	99,03%	97,52%	97,52%	84,45%	84,45%
			Capaian IKU		87,80%	83,22%	83,22%	82,43%	82,43%	81,08%	81,08%
	4a-CP	P/L	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	MAX/TLK							
			Target/Realisasi	710	47	243	243	676	676	813	813
			Capaian IKU		6,62%	34,23%	34,23%	95,21%	95,21%	114,51%	114,51%
	5a-CP	P/M	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKN	15	4	7	7	14	14	19	19
			Capaian IKU		26,67%	46,67%	46,67%	93,33%	93,33%	126,67%	126,67%
5	4b-CP	P/H	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	MAX/TLK							
			Evaluasi kinerja - 50%	50	15	47	47	64	64	79	79
			Penyusunan Rekomendasi - 50%	155	36	83	83	159	159	175	175
		Capaian IKU		26,61%	73,77%	73,77%	115,29%	115,29%	135,45%	135,45%	
6			Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional								
	5a-CP	P/M	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	MIN/TLK							
			Target/Realisasi	19%	0,00%	2,88%	2,88%	2,28%	2,28%	2,12%	2,12%
			Capaian IKU		0,00%	2,88%	2,88%	2,28%	2,28%	2,12%	2,12%
6			Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang efektif								
	6a-CP	P/M	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	MAX/TLK							
			Jumlah realisasi Frekuensi e-Auction		69	158	158	259	259	419	419
			Jumlah realisasi Frekuensi e-Conventional Auction				-	-	-	-	-
			Capaian realisasi e-Auction		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Capaian Realisasi e-Conventional Auction		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Capaian IKU		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6b-CP	P/M	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	MIN/TLK								
a			Deviasi Data PNBPN Lelang	10%	1,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
b			Deviasi Data PNBPN Piutang Negara	10%	2,01%	1,23%	1,23%	1,02%	1,02%	0,00%	
		Rata-Rata Target	10,0%								
		Capaian IKU		1,77%	0,62%	0,62%	0,51%	0,51%	0,00%	0,00%	

LAPORAN CAPAIAN KINERJA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDIMPUAN
KANWIL DJKN SUMATERA UTARA
TAHUN 2022

s.d. 31 Des 2022

SS	IKU	V/C	Uraian IKU	Target Tahun 2022	Realisasi						
					Q1	Q2	Semester 1	Q3	s.d. Q3	Q4	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	-		Edukasi yang efektif								
	7a-N	P/M	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	MAX/TLK							
			Target/Realisasi	89	94,84	91,02	92,93	92,93	96,29	94,61	
			Capaian IKU	-		91,02	92,93	92,93	96,29	94,61	
8	-		Pengawasan dan pengendalian yang efektif								
	8a-CP	P/M	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	MAX/TLK							
			Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2021 yang ditindaklanjuti oleh K/L		20	21	21	21	21	21	
			Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester I 2021 yang ditindaklanjuti oleh K/L		6	13	13	23	23	23	
			Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2021		23	23	23	23	23	23	
			Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester I 2022		10	24	24	24	24	24	
		Capaian IKU		78,79%	72,34%	72,34%	93,62%	93,62%	93,62%	93,62%	
9	-		SDM yang kompeten								
	9a-N	P/M	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	MAX/TLK							
			Jumlah bawahan yang memenuhi kriteria		5	18	18	27	27	27	
			Jumlah bawahan total		26	26	26	27	27	27	
			% Capaian Utama		19,23%	69,23%	69,23%	100,00%	100,00%	100,00%	
			Jumlah bawahan yang telah melebihi kriteria		5	18	18	27	27	27	
			Jumlah bawahan total		26	26	26	27	27	27	
			% Capaian Tambahan		19,23%	69,23%	69,23%	100,00%	100,00%	100,00%	
		Capaian IKU		23,08%	83,08%	83,08%	120,00%	120,00%	120,00%		
10	-		Organisasi yang fit for purpose								
	10b-N	P/M	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	MAX/TLK							
			Target/Realisasi	80					99,05	99	
		Capaian IKU	-					123,81%	123,81%		
10c-N	P/M		Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	MAX/TLK							
			Target/Realisasi	90	99,46	99,64	99,64	99,70	99,70	99,62	99,61
			Capaian IKU	-	99,46	99,64	99,64	99,70	99,70	99,62	99,61

LAPORAN CAPAIAN KINERJA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDIMPUAN
KANWIL DJKN SUMATERA UTARA
TAHUN 2022

s.d. 31 Des 2022

SS	IKU	V/C	Uraian IKU	Target Tahun 2022	Realisasi						
					Q1	Q2	Semester 1	Q3	s.d. Q3	Q4	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	-		Pengelolaan Keuangan yang Optimal								
	11a-CP	P/M	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	MAX/TLK							
			Target/Realisasi	95,50%	100,00%	99,98%	99,98%	99,99%	99,99%	94,75%	94,75%
			Capaian IKU		104,71%	104,69%	104,69%	104,70%	104,70%	99,22%	99,22%
	11b-CP	P/M	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	MAX/TLK							
			Target/Realisasi	100%						203%	203,00%
			Capaian IKU							203,00%	203,00%

Plh. Kepala KPKNL Padangsidimpuan

Plh. Kepala Seksi Kepatuhan Internal

Ttd

Ditandatangani secara elektronik
Mide Parma Swanda

Santy Nova Theresia Hutagalung

NILAI KINERJA ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDIMPUAN
PERIODE TRIWULAN IV
TAHUN 2022

Kode	IKU	V/C	Target Q4	Realisasi Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%
	Stakeholder Perspective(25%)							30,00%
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian							120,00%
1b-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100%	165,72%	14%	50%	165,72%	120,00%
1c-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	36%	47,73%	14%	50%	132,59%	120,00%
	Customer Perspective(15%)							16,58%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							120,00%
2a-CP	Persentase Penurunan outstanding piutang	P/M	100%	1205,09%	14%	50%	1205,09%	120,00%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/M	100%	191,89%	14%	50%	191,89%	120,00%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang tinggi							101,05%
3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	E/M	4,76	4,81	21%	100%	101,05%	101,05%
	Internal Process Perspective (30%)							34,15%
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							118,34%
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/L	65%	81,08%	19%	30%	124,73%	120,00%
4b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	100%	114,51%	19%	30%	114,51%	114,51%
4c-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	P/M	100%	126,67%	14%	22%	126,67%	120,00%
4d-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	135,45%	11%	17%	135,45%	120,00%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							120,00%
5a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	19%	2,12%	14%	100%	188,84%	120,00%
6	Penerapan TataKelola Piutang Negara dan Lelang yang efektif							114,35%
6a-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventiona	P/M	92%	100,00%	14%	50%	108,70%	108,70%
6b-CP	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	P/M	10,0%	0,00%	14%	50%	200,00%	120,00%
7	Edukasi yang efektif							106,30%
7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	89	94,61	14%	100%	106,30%	106,30%
8	Pengawasan dan pengendalian yang efektif							110,14%
7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	P/M	85%	93,62%	14%	100%	110,14%	110,14%
	Learning & Growth Perspective (30%)							34,49%
9	SDM yang kompeten							120,00%
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120,00%	14%	100%	120,00%	120,00%
10	Organisasi yang fit for purpose							115,34%
10b-N	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	P/M	80	99,05	14%	50%	123,81%	120,00%
10c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	P/M	90	99,61	14%	50%	110,67%	110,67%
11	Pengelolaan Keuangan yang Optimal							109,61%
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95,5%	94,75%	14%	50%	99,22%	99,22%
11b-CP	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	P/M	100,0%	203,00%	14%	50%	203,00%	120,00%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								115,22%

Mengetahui,

Plh. Kepala KPKNL Padangsidimpuan



Ditandatangani secara elektronik
Mide Parma Swanda

Plh. Kepala Seksi Kepatuhan Internal

Selaku Mitra Manajer Kinerja Organisasi

Ttd

Santy Nova Theresia Hutagalung



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 PADANG
SIDEMPUAN

JALAN KENANGA NO.50 PADANG SIDEMPUAN 22725
TELP. (0634) 21326 SUREL : kppn006@kemenkeu.go.id
LAMAMAN: <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/kppn/padangsidempuan/id>

Nomor : S-218/KPN.0205/2023 7 Februari 2023
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Apresiasi Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Periode Triwulan IV Tahun 2022

Yth. Para KPA Satker Lingkup KPPN Padang Sidempuan
Di Tempat

Sehubungan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Belanja Kementerian Negara/Lembaga, dan memperhatikan hasil monev IKPA periode sampai dengan Desember 2022 pada aplikasi OMSPAN, dapat kami sampaikan hal-hal berikut:

1. Berdasarkan data pada OMSPAN sampai dengan Desember 2022, nilai capaian IKPA Satker mitra KPPN Padang Sidempuan untuk periode Triwulan IV Tahun 2022 adalah sebesar 94.52 (kategori baik) melebihi **target nasional**. Kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Satker atas pencapaian nilai IKPA tersebut.
2. Sebagai bentuk apresiasi, Satker dengan nilai IKPA terbaik ke-1 sampai dengan terbaik ke-5 untuk tiap kategori pagu, diberikan **prioritas pengajuan SPM** sampai dengan pukul 17.00 WIB setiap hari kerja **hingga tanggal 31 Maret 2023** dengan tetap mempedomani peraturan yang berlaku.
3. Nilai IKPA Satker terbaik sampai dengan Desember 2022 yang terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori pagu sebagaimana terlampir.
4. Untuk selanjutnya, kami berharap capaian nilai IKPA dapat terus ditingkatkan agar lebih optimal terutama bagi Satker yang masih memiliki nilai IKPA di bawah <95.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Tipe A1
Padang Sidempuan



Ditandatangani secara elektronik
IENG



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN TRIWULAN IV TAHUN 2022

Pagu DIPA s.d. Rp 5 Milyar

No.	Kode Satker	Nama Satuan Kerja	Pagu DIPA	Nilai IKPA
1	506090	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUAN	1.919.584.000	99,36
2	689465	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN MANDAILING NATAL	1.930.305.000	99,05
3	554471	MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 PADANG LAWAS	4.098.902.000	98,77
4	689472	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TAPANULI SELATAN	2.191.322.000	98,4
5	405982	RUTAN KELAS IIB SIBUHUAN	3.380.580.000	98,21
6	650068	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN	194.354.000	97,84
7	690112	PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN	34.200.000	97,46
8	405951	RUTAN KELAS IIB SIPIROK	3.472.796.000	97,33
9	631982	PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN	2.942.102.000	97,29
10	573933	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 MANDAILING NATAL KAB. MANDAILING NATAL	1.083.354.000	97,24
11	682232	PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN	2.338.290.000	97,14
12	405911	LAPAS KELAS III GUNUNG TUA	4.212.926.000	96,98
13	405891	LAPAS KELAS III KOTANOPAN	2.591.758.000	96,92
14	663733	STASIUN METEOROLOGI AEK GODANG	2.069.451.000	96,22
15	681748	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	1.697.021.000	96,04
16	575769	MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 MANDAILING NATAL KAB. MANDAILING NATAL	4.153.477.000	95,91
17	575773	MADRASAH ALIYAH NEGERI TAPANULI SELATAN KAB. TAPANULI SELATAN	4.848.489.000	95,7
18	405998	RUTAN KELAS IIB NATAL	2.680.359.000	95,51
19	661977	MADRASAH ALIYAH NEGERI 5 MANDAILING NATAL KAB. MANDAILING NATAL	2.606.595.000	95,44
20	622568	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MANDAILING NATAL	511.914.000	95,37
21	681751	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	720.748.000	95,3
22	299212	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TAPANULI SELATAN	2.870.113.000	95,22
23	681752	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PADANG LAWAS	1.753.587.000	95,18
24	656070	KPU KOTA PADANG SIDEMPUAN	4.479.766.000	95,16
25	573890	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 PADANG LAWAS	3.498.807.000	95,09
26	601653	MADRASAH ALIYAH NEGERI 4 MANDAILING NATAL	2.676.381.000	94,95
27	552797	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 MANDAILING NATAL KAB. MANDAILING NATAL	2.254.488.000	94,7
28	559222	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BATAHAN	3.532.342.000	94,38
29	650069	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN	605.292.000	94,3
30	401880	PENGADILAN AGAMA PADANG SIDEMPUAN	2.545.882.000	94,29
31	573865	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 PADANG LAWAS UTARA KAB. PADANG LAWAS UTARA	4.212.837.000	94,26
32	601564	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 TAPANULI SELATAN	4.792.568.000	94,2
33	622564	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MANDAILING NATAL	2.021.743.000	93,99
34	573886	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 PADANG LAWAS UTARA	1.496.142.000	93,93
35	655970	KPU KABUPATEN MANDAILING NATAL	3.819.348.000	93,9
36	573912	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 PADANG LAWAS UTARA	1.400.661.000	93,89
37	099201	PENGADILAN NEGERI PADANG SIDEMPUAN	418.418.000	93,86
38	575780	MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 PADANG LAWAS KAB. PADANG LAWAS	4.693.668.000	93,84
39	661061	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 6 MANDAILING NATAL KAB. MANDAILING NATAL	3.532.913.000	93,66
40	477399	PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL	4.186.694.000	93,66
41	650067	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN	3.063.717.000	93,64
42	655853	KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN	4.220.748.000	93,64
43	575748	MADRASAH ALIYAH NEGERI PADANG LAWAS UTARA KAB. PADANG LAWAS UTARA	3.250.256.000	93,45
44	670777	KPU KAB. PADANG LAWAS	4.462.402.000	93,3
45	553682	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 PADANG LAWAS UTARA	3.924.178.000	92,98
46	402040	PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN	75.610.000	92,93
47	573851	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 TAPANULI SELATAN KAB. TAPANULI SELATAN	4.180.504.000	92,76
48	072309	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PADANG LAWAS UTARA	424.540.000	92,64
49	553675	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 PADANG LAWAS KAB. PADANG LAWAS	1.665.979.000	92,55
50	072215	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PADANG LAWAS	329.480.000	92,54
51	573929	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 TAPANULI SELATAN KAB. TAPANULI SELATAN	2.786.094.000	92,47
52	650062	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN	2.553.575.000	92,38
53	601550	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 5 MANDAILING NATAL KAB. MANDAILING NATAL	2.827	91,5
54	006575	CABANG KEJAKSAAN NEGERI MANDAILING NATAL DI NATAL	2.628	91,7



55	006554	CABANG KEJAKSAAN NEGERI MANDAILING NATAL DI KOTANOPAN	2.736.298.000	91,89
56	631983	PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN	103.580.000	91,87
57	573872	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 PADANG LAWAS	1.824.239.000	91,5
58	299302	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TAPANULI SELATAN	3.477.626.000	91,46
59	601674	MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 PADANG LAWAS KAB. PADANG LAWAS	1.613.138.000	91,45
60	649991	KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG SIDEMPUAN	4.157.373.000	91,18
61	681755	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PADANG LAWAS	436.883.000	91,15
62	670760	KPU KAB. PADANG LAWAS UTARA	4.530.326.000	90,82
63	402014	PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN	108.380.000	90,65
64	299303	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TAPANULI SELATAN	773.587.000	90,54
65	622567	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MANDAILING NATAL	1.128.504.000	89,5
66	299304	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TAPANULI SELATAN	660.679.000	87,99
67	477401	PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL	229.990.000	86,67
68	401881	PENGADILAN AGAMA PADANG SIDEMPUAN	63.200.000	83,8